

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Orde Baru di Indonesia (1966-1998), di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru berfokus pada upaya menciptakan kestabilan dalam politik dan pertumbuhan ekonomi melalui sistem pemerintahan yang terpusat dan kekuasaan yang otoriter. Meskipun dalam masa pemerintahannya membawa beberapa kemajuan dalam pembangunan dan ekonomi, namun cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya seringkali mengorbankan kebebasan sipil, kebebasan dalam berpendapat dengan banyak membungkam suara, dan berpolitik. Masa kekuasaan Soeharto menerapkan kebijakan-kebijakan represif untuk menjaga kendali politik, dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap media pemberitaan, pembatasan kegiatan politik masyarakat, dan penindasan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam kestabilan dan kekuasaan negara.¹

Maraknya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), sistem politik yang dikuasai oleh Golongan Karya (Golkar) serta keterlibatan militer dalam pemerintahan yang semakin memperkuat hegemoni² kekuasaan Orde Baru.³ Kekuatan militer dan kepolisian dimanfaatkan secara efektif oleh kekuasaan Orde Baru sebagai perlawanan balik untuk menekan perlawanan yang dilakukan oleh kalangan aktivis, mahasiswa, dan tokoh politik yang berupaya mengkritik dan melawan kebijakan Orde Baru.⁴

¹ Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds.), *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch* (Canberra: ANU Press, 2010), Hal. 45-67.

² *Hegemoni* adalah dominasi, pengaruh, atau kepemimpinan suatu kelompok negara, atau entitas lain atas kelompok entitas lainnya, baik dalam bidang ekonomi, politik,, maupun budaya.

³ Harold Crouch, *The Army and Political in Indonesia* (Ithaca : Cornell University Press, 1988), Hal. 235-240.

⁴ Max Lane, *Unfinished Nation: Indonesia before and after Suharto* (London: Verso, 2008), Hal. 102-115.

Pemerintahan masa Orde Baru menunjukkan sikap represif⁵ terhadap suara-suara kritis terutama yang datang dari kalangan intelektual, aktivis, dan politisi oposisi. Penggunaan instrumen hukum, pelanggaran buku, serta stigmatisasi terhadap individu kritis menjadi alat utama dalam meredam oposisi. Salah satu tokoh yang menjadi sorotan bagi pemerintah adalah Sri Bintang Pamungkas yang vokal dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan Orde Baru dan kepada Presiden Soeharto secara langsung. Sikap pemerintah Orde Baru terhadap sikap kritis Sri Bintang Pamungkas, setidaknya ada tiga Hal yang dilakukan, yaitu dengan menghukum secara kontruksi hukum, pembredelan dan sensor, juga pembungkaman. Pemerintah menunjukan sikap represif, yaitu salah satu peristiwa yang mencolok adalah penangkapan Sri Bintang pada tahun 1995 sepulangnya dari Jerman, setelah ia menyuarakan kritik kepada Soeharto dalam sebuah forum internasional. Ia di dakwa menghina Presiden berdasarkan Pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap kepala negara, serta dituduh melakukan tindakan subversif.⁶ Tuduhan ini mencerminkan betapa ketatnya ruang demokrasi pada masa itu, kritik terhadap presiden dapat dikriminalisasi.

Menurut Eep Saefulloh Fatah, pembungkaman terhadap kritik merupakan bagian dari strategi stabilitas politik Orde Baru melalui manajemen konflik represif yang sistematis.⁷ Negara mengontrol media, kampus, hingga partai politik untuk memastikan tidak munculnya oposisi terbuka terhadap pusat kekuasaan. Dalam Hal ini tindakan terhadap Sri Bintang bukanlah peristiwa tunggal, tetapi menjadi bagian dari pola besar pembungkaman pikiran kritis, hal ini konsisten dengan kebijakan umum pemerintah terhadap buku dan media yang dianggap subversif, sebagai mana yang dialami pula oleh penulis lain seperti Pramoedya

⁵ *Represif* adalah salah satu sifat dalam sistem pengendalian sosial, yang bersifat menekan, mengekang, atau menindas kebebasan dan hak-hak individu. Subversif adalah suatu tindakan, ide, atau individu yang berusaha untuk merusak atau menggulingkan suatu sistem yang ada, khususnya pemerintahan atau sistem politik.

⁶ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights : Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. (Jakarta : Gramedia, 1993), Hal. 203.

⁷ Eep Saefulloh Fatah, *Orde Baru : Manajemen Konflik dan Kekuasaan*. (Bandung: Mizan, 1996). Hal. 88-92.

Ananta Toer.⁸ Selain kriminalisasi, Orde Baru melakukan pembredelan dan pelanggaran karya-karya Sri Bintang.

Buku-buku seperti *Melawan Kediktatoran : Pergulatan Tak Kunjung Usai* dan buku *Saya Musuh Politik Soeharto*, tidak lagi mendapatkan izin edar dan secara efektif dilarang beredar, guna mencegah penyebaran gagasan alternatif untuk publik karena dianggap sebagai bentuk agitasi politik.⁹ Selain itu juga pemerintah aktif membredel media seperti *Tempo*, *Sinar Harapan* yang memuat tulisan-tulisan kritik Sri Bintang terhadap pemerintah dengan tujuan pemerintah untuk mendingkan kritik publik.

Meskipun upaya pembungkaman dilakukan secara sistematis, hal itu tidak serta-merta menghapus pengaruh pemikiran Sri Bintang. Justru, tindakan represif negara membentuknya sebagai simbol resistensi¹⁰ terhadap pemerintahan otoriter. Dalam banyak tulisan, ia menekankan pentingnya daulat rakyat dan demokratisasi sebagai jalan menuju Indonesia yang lebih adil.¹¹ Setelah reformasi 1998, banyak gagasan Sri Bintang menemukan ruang yang lebih terbuka dalam diskursus publik, meskipun ia tetap berada di posisi krisis terhadap penguasa.

Setelah berkuasa selama 32 tahun, Soeharto yang menjadi Presiden kedua ini, meninggalkan segudang kedosaan yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada awalnya Sri Bintang menyebutkan ada empat dosa besar Soeharto (Pamungkas; 2005). Pertama, besarnya hutang luar negeri yang harus dibayar kembali dengan kemelaratan rakyat, bahkan hutang tersebut masih belum terbayarkan hingga sekarang ini. Hutang yang dimiliki pada akhir jabatannya tidak kurang dari USD 130 milyar. Kedua, rusaknya sumberdaya alam Indonesia beserta lingkungan hidupnya digunakan untuk kepentingan pihak Barat. Dalam masa Soeharto barang-barang tambanglah yang menjadi sasaran utamanya. Proyek pertamanya adalah menjual tembaga, emas, dan kekayaan

⁸ Pramodya Ananta Toer, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*. (Jakarta: Hasta Mitra, 1995), Hal. 15-20.

⁹ Sri Bintang Pamungkas, *Melawan Kediktatoran : Pergulatan Tak Kunjung Usai*. (Jakarta: Forum Demokrasi, 1998), Hal.25-28. Agitasi Politik adalah sebuah strategi komunikasi politik yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan memperkuat posisi politik.

¹⁰ *Resistensi* adalah perlawanan atau penolakan terhadap kebijakan, tindakan, atau kekuatan politik tertentu.

¹¹ Sri Bintang Pamungkas, *Sri Bintang Pamungkas dan Daulat Rakyat* (Jakarta: PUDI Press, 1999), Hal. 34-40.

lainnya di Tamban Pura, Timika, Irian Jaya, kepada Freeport dan Amerika Serikat. Selain itu pula, menjual habis hutan-hutan tropis Indonesia, termasuk kayu yang berumur ribuan tahun, seta rotan, dan hasil dari flora dan fauna di dalamnya, bukan hanya masyarakat yang tidak bisa menikmati alamnya, gundulnya hutan yang mengakibatkan bencana alam terjadi, seperti banjir di mana-mana. Ketiga adalah senangnya mengalirkan darah rakyat Indonesia. Selain ratusan ribu orang yang tewas karena di tuduh sebagai kelompok komunis pasca G30SPKI, banyak pula yang sengaja di tembak dalam berbagai peristiwa. Senjata yang digunakan Soeharto adalah TNI dan Polri, mereka lebih suka membunuh rakyatnya sendiri dengan anggapan bahwa musuh negara ada di dalam negeri. Keempat, adalah warisan tindakan pidana korupsi, korupsi terhadap hutang asing dan uang rakyat dari hasil pajak yang digunakan untuk kepentingan keluarga dan proyek-proyek yang tidak bermanfaat. Hingga pada akhirnya budaya korupsi ini ditiru oleh bawahan-bawahannya, oleh pejabat dan penggantinya sehingga sudah meluas menjadi wabah penyakit yang hinggap di lapisan masyarakat dan kelompok kekuasaan.¹²

Ditengah kondisi politik yang represif, kemudian munculah sejumlah tokoh yang berani menentang dan mengkritik kebijakan Orde Baru. Salah satu tokoh yang muncul dan konsisten menggemborkan dan menyuarakan kritikan terhadap pemerintahan Soeharto adalah Sri Bintang Pamungkas, dia merupakan seorang akademisi dan aktivis politik yang lantang mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran dan ketidakadilan di bawah kekuasaan Orde Baru.¹³ Pada akhir tahun 1970-an, Sri Bintang mulai menunjukkan ketidaksetujuan dan ketidaksepatanya terhadap pemerintahan Orde Baru, terkhusus mengenai pembatasan hak dalam berpolitik masyarakat dan monopoli kekuasaan oleh militer dan elit politik yang memang dekat dengan Soeharto. Sikap kritis Sri Bintang Pamungkas dapat dilihat melalui orientasi kritik intelektualnya berbasis pengetahuan dan analisis rasional, kritiknya terhadap sistem pemerintahan dan kebijakan negara biasanya ia sertai dengan analisis struktural dan historis, seperti

¹² Pamungkas, Sri Bintang, *"Ganti Rezim Ganti Sistim : Pergulatan Menuasai Nusantara"*. (Jakarta: El Bisma, 2014). Hal. 2

¹³ Damien Kingsbury, *Power Politics and the Indonesian Military* (New York: Routledge, 2003), Hal. 60-78.

dalam beberapa tulisan yang Sri Bintang buat adalah mengkritik ketimpangan ekonomi berdasarkan teori ketergantungan dan kedaulatan ekonomi nasional. Selain pada basis ilmu pengetahuannya, ia juga mandiri secara moral dan politik, karena dalam pandangannya seorang intelektual tidak tunduk pada kekuasaan atau kepentingan pragmatis, Sri Bintang secara konsisten dalam bersikap kritis, baik melalui tulisan, demonstrasi, dan pembentukan partai politik baru, bahkan ketika hal itu membuatnya ditangkap hingga di penjara oleh pemerintah Orde Baru. Kritik intelektual yang dibawakan olehnya berorientasi pula pada kepentingan rakyat, keteguhan ini menjadi ciri khas intelektual organik Gramscian yang berpihak pada kebenaran publik, bukan pada kekuasaan. Ia menentang praktik oligarki dan dominasi ekonomi asing yang menurutnya merugikan kedaulatan nasional, dari sikap kritisnya tersebut Sri Bintang menawarkan visi perubahan dengan menawarkan solusi atau saran perubahan. Ciri penting kritik intelektual adalah keberanian menentang narasi dominan atau kekuasaan hegemonik.

Bentuk sikap kritis Sri Bintang adalah dengan mengkritik kebijakan yang hadir pada masa Orde Baru yakni pada banyak bidang. *Pertama* adanya pembatasan dalam pembebasan kampus. Sri Bintang, sebagai akademisi yang perannya menjadi dosen di Universitas Indonesia dan aktif dalam diskursus publik, mengecam kebijakan orde baru yang membungkam suara kritis di lingkungan perguruan tinggi. Ia menilai bahwa pembungkaman terhadap kampus adalah bentuk pembajakan terhadap institusi ilmu pengetahuan, dimana seharusnya kebebasan berpikir dijunjung tinggi.¹⁴ Pembatasan tersebut nampak dalam kebijakan seperti Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK), yang diberlakukan sejak akhir 1978. Kebijakan ini diberlakukan setelah berbagai aksi mahasiswa yang memprotes otoritarisme pemerintahan Soeharto. Akibatnya, kegiatan politik mahasiswa dikendalikan, organisasi intra-kampus dihapuskan, dan dosen serta mahasiswa yang kritis bisa dipecat atau dicabut hak akademiknya.¹⁵

¹⁴ Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Melalui Reformasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Hal. 45–47.

¹⁵ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negeri Orde Baru*. (Jakarta: Gramedia, 2003), Hal. 198-200.

Kedua, selain pembatasan kebebasan berpikir di kampus, Sri Bintang Pamungkas juga secara konsisten mengkritik kebijakan ekonomi Orde Baru, terutama dalam hal ketergantungan pada utang luar negeri. Sri Bintang mengatakan, kebijakan ini tidak hanya melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia, namun membuat negara terjebak dalam kontrol lembaga-lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia, dan IGGI (Intern-Governmental Group on Indonesia). Menurutnya, bahwa hutang luar negeri digunakan secara akuntabel oleh pemerintahan Orde Baru, yang memperkuat elite tertentu sambil menindas rakyat kecil. Ia mengkritik keras pola pembangunan ekonomi Orde Baru yang bersifat *trickel-down effect*, yang dimana pertumbuhan ekonomi diprioritaskan, namun tanpa pemerataan dan akuntabilitas penggunaan utang.¹⁶ Data dari berbagai sumber mencatat bahwa utang luar negeri Indonesia meningkat signifikan selama masa Orde Baru. Pada tahun 1967, utang luar negeri tercatat sekitar US\$2,5 miliar, dan angka ini melonjak menjadi lebih dari US\$60 miliar pada akhir kekuasaan Soeharto tahun 1998.¹⁷ *Ketiga*, kritiknya terhadap sistem pemerintahan Orde Baru telah mengalami deviasi besar dari nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya, menurutnya mekanisme pemilu pada Masa Orde Baru tidak demokratis, karena dikendalikan oleh kekuasaan eksekutif melalui Golongan Karya (Golkar), serta aparat militer turut berperan aktif dalam menekan partai politik oposisi. Dalam bukunya “Melawan Kediktatoran”, ia menggambarkan melalui karyanya bahwa parlemen hanyalah stempel kekuasaan eksekutif dan tidak fungsi *check and balance* yang memadai.¹⁸ *Keempat*, kritiknya terhadap fungsi DPR pada masa Orde Baru, yang dinilai telah mengalami kemerosotan fungsi selama kekuasaan Presiden Soeharto, yang seharusnya DPR menjadi wakil rakyat yang kritis dan independen. *Kelima*, Presiden Soeharto memaknai peran militer dalam pemerintah, khususnya dalam pembenaran terhadap doktrin Dwi Fungsi ABRI yang menjadi dasar dari kebijakan militerisasi di masa Orde Baru, dalam bukunya *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*,

¹⁶ Sri Bintang Pamungkas, *Melawan Kediktatoran: Pergulatan Tak Kunjung Usai*. Hal. 75–80.

¹⁷ Ichlasul Amal, *Politik Ekonomi Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hal. 138.

¹⁸ Sri Bintang Pamungkas, *Dibalik Jeruji Besi: Menggugat Dakwaan Subversif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Hal. 102–110.

Soeharto menjelaskan pembelaan terhadap fungsi sosial, politik ABRI sebagai “bagian dari tanggungjawab sejarah militer dalam menjaga stabilitas nasional.”¹⁹

Hal inilah yang menjadi kritik keras Sri Bintang terhadap kebijakan militerisasi politik pada masa Orde Baru, terutama dominasi militer dalam kehidupan sipil dan struktur pemerintahan. Menurutnya hal ini merupakan pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi, karena seharusnya kekuasaan politik berasal dari rakyat. Bukti konkret dari militerisasi ini nampak pada keberadaan 75 kursi ABRI di DPR RI tanpa melalui pemilu selama Orde Baru, juga banyaknya jabatan sipil yang diisi oleh purnawirawan atau purna aktif, termasuk di kementerian, kepala daerah, hingga perguruan tinggi.²⁰ *Keenam*, Sri Bintang tidak terlepas mengenai kritiknya terhadap segala aspek bidang pada masa Orde Baru, ia juga mengkritik terhadap kebijakan pendidikan dan pembangunan. Arah pembangunan Orde Baru yang bersifat *top-down*, teknokratis, dan cenderung mengabaikan partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan publik, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam hal pembangunan, Sri Bintang menyoroti bahwa proyek-proyek besar seringkali menggunakan biaya dari utang luar negeri tanpa disertai transparansi.

Dalam bidang pendidikan, menurutnya pendidikan pada masa Orde Baru lebih diarahkan untuk melanggengkan kekuasaan dan tidak memberi ruang intelektual, salahsatu bentuk contohnya adalah pembungkaman aktivitas politik mahasiswa melalui Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).²¹ *Ketujuh*, Presiden Soeharto dalam pidatonya seringkali menekankan pentingnya “stabilitas nasional” dan “ketertiban hukum”,²² namun seringkali hukum debrikan kepada pihak-pihak yang dianggap mengancam kekuasaan, sementara para pelanggar hukum dari kalangan elit dan militer dibiarkan bebas. Penerapan hukum menjadi sorotan pula bagi Sri Bintang dalam kritiknya terhadap Orde Baru, ia menyoroti bagaimana hukum digunakan bukan

¹⁹ Soeharto, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), Hal. 162.

²⁰ Salim Said, *Genesis of Power: Asal-Usul Militer Indonesia dan Peran Politikanya 1945–2004* (Jakarta: Mizan, 2006), Hal. 197.

²¹ Sri Bintang Pamungkas, *Melawan Kediktatoran: Pergulatan Tak Kunjung Usai*, Hal. 72–74.

²² Soeharto, *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*, Hal. 98–100.

sebagai alat keadilan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan untuk membungkam oposisi, membatasi kebebasan berpendapat, dan menjaga stabilitas semu bagi kelanggengan Orde Baru. Penerapan hukum seperti ini terlihat jelas dalam kasus Undang-Undang Subversif No. 11 Tahun 1963, yang digunakan untuk menangkap tokoh-tokoh kritis terhadap pemerintah.²³ Kedelapan, salah satu kritik Sri Bintang mengenai praktik korupsi. Perusahaan-perusahaan besar yang dipegang oleh keluarga Cendana mendapatkan berbagai fasilitas negara, proyek-proyek strategis, serta konsesi sumber daya alam tanpa mekanisme kontrol yang transparan.²⁴

Sebagai salah satu tokoh yang konsisten dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru, Sri Bintang menempuh berbagai jalur untuk menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sikap kritisnya tidak hanya tampil di forum-forum intelektual, namun juga terwujud melalui berbagai sarana yang digunakan, yaitu penulisan karya ilmiah dan buku-buku diantaranya karya bukunya “Melawan Kediktatoran : Pergulatan Tak Kunjung Usai” buku ini ditujukan secara tegas untuk mengkritik sistem otoriter Orde Baru serta menjelaskan bentuk-bentuk represi negara terhadap oposisi,²⁵ buku kedua dengan judul “Perintis Oposisi dan Reformasi”, buku ini menjelaskan kronik keterlibatannya dalam gerakan oposisi, serta menyoroti bagaimana kebijakan Orde Baru mereduksi kebebasan berpikir dan berpolitik. Media selain melalui karya tulisnya adalah berpartisipasi, ikut aktif dalam mengorganisir dan memimpin dalam aksi demonstrasi, terutama menjelang jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, adanya peristiwa penting yaitu keterlibatannya dalam berbagai aksi pro-reformasi dan demonstrasi mahasiswa di Jakarta untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Melalui orasi dan forum diskusi terbuka, Sri Bintang menyerukan perlawanan damai melalui gerakan rakyat, serta menentang militerisasi politik dan represi terhadap kebebasan berpendapat.²⁶ hingga pembentukan partai sebagai media perjuangan demokrasi.

²³ Sri Bintang Pamungkas, *Dibalik Jeruji Besi: Menggugat Dakwaan Subversif*, Hal. 15–19.

²⁴ Sri Bintang Pamungkas, *Melawan Kediktatoran: Pergulatan Tak Kunjung Usai*, Hal. 97–100.

²⁵ Sri Bintang Pamungkas, *Melawan Kediktatoran: Pergulatan Tak Kunjung Usai*, Hal. 34-40.

²⁶ Hermawan Sulistyo, *Politik Militer di Indonesia 1966-1998*. (Jakarta: LP3ES, 2001). Hal.224-225.

Seiring berjalanya waktu, perlawanan intelektual Sri Bintang terhadap kebijakan di masa Orde Baru, Soeharto semakin terang-terangan dan terbuka juga tegas, terkhusus pada dekade tahun 1990-an. Sikap kritis Sri Bintang dibuktikan dengan pendirian Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI). Partai ini dibentuk sebagai langkah nyata menyatakan kritik terhadap sistem politik Orde Baru yang cenderung membatasi partai-partai politik independen.²⁷ Sri Bintang Pamungkas dikenal sebagai tokoh oposisi yang vokal mengkritik kebijakan masa Orde Baru. Kritiknya mencakup berbagai isu, seperti ketimpangan sosial akibat kebijakan pembangunan yang bias, dan berbagai kebijakan lainnya yang banyak merugikan masyarakat, terutama dalam kebebasan berpolitik. Maka Sri Bintang mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada tahun 1996, partai ini dibentuk sebagai wadah politik untuk melawan dominasi Golkar dan mendukung demokratisasi.²⁸ Latar belakang pendirian Partai Uni Demokrasi Indonesia adalah semangat dalam melawan pemerintahan Orde Baru, Sri Bintang berpandangan perlu adanya partai baru disamping partai yang sudah ada yakni PPP, PDI, GOLKAR. PUDI ini menjadi partai oposisi terhadap pemerintah untuk memperjuangkan kehidupan yang demokrasi. Partai baru memberi peluang terhadap perubahan yang mendasar bagi Indonesia. Setelah lama berkampanye untuk pembentukan partai baru di seluruh negeri bahkan luar negeri, maka pada tahun 1995 dibentuklah kepanitiaan untuk mendirikan partai baru itu. Panitia tersebut diketuai oleh Sri Bintang Pamungkas, sekretaris Saleh Abdullah, Rani Yunsih dan Jus Soema di Pradja sebagai anggota. Nama Partai Uni Demokrasi Indonesia sendiri timbul sebagai suatu lontaran tiba-tiba yang disampaikan dalam suatu konferensi pers ketika menanggapi maraknya organisasi-organisasi masa baru yang menggunakan nama yang sama dengan partai-partai politik pada masa lalu, seperti PNI-Baru, Parkindo-Baru dan Masyumi-Baru.²⁹

Setelah melalui serangkaian pertemuan antara Panitia Pembentukan Partai Baru dan beberapa tokoh gerakan pembaharuan dan pro-demokrasi, pada akhirnya ditetapkanlah deklarasi atau proklamasi partai baru Partai Uni Demokrasi

²⁷ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sri_Bintang_Pamungkas

²⁸ Richard Robison, *Indonesia : The Rise of Capital* (Sydney : Allen dan Unwin. 1986), Hal. 274-278.

²⁹ Majalah Gatra, 3 Juni 1996. Hal. 34

Indonesia pada 9 Mei 1995, bertepatan dengan 10 Muharram 1417 Hijriah.³⁰ Dalam acara peresmian PUDI yang dihadiri oleh sejumlah aktivis YLBHI Jakarta, Sri Bintang membacakan proklamasi pendirian partai yang merupakan bagian dari buku kecil Manifesto Politik, Rancangan Dasar dan Struktur PUDI yang berisi AD/ART partai. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Yayasan LBH Indonesia yakni Bambang Widjojanto, Ridwan Saidi, SK Trimurti, serta mantan Ketua Dewan Yayasan LBHI, Adnan Buyung Nasution. Bintang mengemukakan bahwa PUDI hanya butuh legitimasi dari masyarakat bukan dari pemerintah. Dalam struktur Sri Bintang Pamungkas sebagai ketua umum PUDI dengan wakil Yulius Usman dari angkatan 66, Sekretaris umum Saleh Abdullah (Koordinatus LSM Infight), sedangkan jajaran anggota PUDI terdapat Yoppy Lasut (mantan wartawan Sinar Harapan dan Indoneisa Raya), Sunardi SH (Ketua Gerkana Marhaen), Saut Sirait (aktivis HKBP), Jimmy Alfons, Beathor Suryadi (LSM Pijar). Selain mereka, Bintang juga menyebutkan nama-nama HM Snausi, HJ Princen, serta Subiando Sastrosatomo. PUDI mengambil warna partai merah-putih-hijau dengan menjadikan seluruh lambang Garuda Pancasila lengkap dengan perisainya sebagai lambang partai dalam cover manifesto politik PUDI. Dalam proklamasi partai barunya Sri Bintang mengatakan, pihaknya mengambil keputusan untuk melakukan perjuangan politik dengan memegang kuat prinsip demokrasi, dalam upaya melaksanakan reformasi terhadap sistem penyelenggaraan negara menjadi sistem penyelenggara negara yang rakyatnya berdaulat, merdeka, dan bebas dari rasa takut.

Menurut PUDI ada enam pilar yang harus dijalankan untuk mewujudkan Indonesia Baru. Ideologi partai ini adalah demokrasi religius, yaitu demokrasi yang implisit di dalamnya pengakuan terhadap kedaulatan Allah swt, akhlak mulia dijunjung tinggi, pada saat bersamaan PUDI mengakui Pancasila sebagai dasar negara bukan Ideologi negara³¹ berdirinya Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) menjadi suatu hal yang mengagetkan bagi pemerintahan Orde Baru,

³⁰ PUDI. *Manifesto Politik, Rancangan Dasar Dan Struktur Partai Uni Demokrasi Indonesia* (Penerbit PUDI, 1966), Hal. 1

³¹ PUDI. *Manifesto Politik, Rancangan Dasar Dan Struktur Partai Uni Demokrasi Indonesia*, Hal. 3

menjadi sebuah peringatan yang banyak menggentarkan penguasa di Indonesia dan mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak dalam dan luar negeri.

Melalui kritiknya, Sri Bintang juga memanfaatkan keilmunyanya dan kecerdasan intelektualnya, dia membuat tulisan-tulisan dalam menyuarakan kritiknya juga melalui pidato. Namun sikap kritisnya terhadap pemerintah membuatnya menjadi sasaran tindakan represif, termasuk penahanan dengan tuduhan subversif pada tahun 1996.³² Keberanian Sri Bintang dalam mendirikan PUDI banyak memicu kekhawatiran pemerintah, yang kemudian menganggap Sri Bintang sebagai ancaman yang besar dan serius bagi stabilitas pemerintahan. Pemerintah ternyata tidak hanya diam mengenai hal tersebut, kemudian sebagai tindak lanjut pemerintah menuduh Sri Bintang melakukan tindakan subversif dan memenjarakannya, hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap upaya-upaya perlawanan yang berpotensi merusak wibawa dan kekuasaan Orde Baru.³³ Dapat dilihat bahwa tindakan tersebut menjadi bukti nyata dari resesi pemerintah terhadap suara-suara oposisi, dimana ada yang menentang, penjara langsung menjadi tempat mereka ditahan dan suaranya yang dibungkam atas ketidaksepatan terhadap kebijakan Orde Baru.

Sikap-sikap kritis Sri Bintang melalui pidato dan tulisannya terhadap Orde Baru, semuanya termuat dalam karyanya yang berjudul “Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Melalui Reformasi.” Dalam karyanya ini merupakan sebuah refleksi pemikiran politik dan perjuangan oposisi terhadap Orde Baru serta merupakan gagasan alternatif menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, adapun diantara pokok-pokok pikiran dalam karyanya tersebut adalah:³⁴

1. Kritik terhadap Pemerintah Orde Baru
2. Urgensi Reformasi Formal
3. Peran Rakyat dalam Perubahan
4. Gagasan Indonesia Baru

³² Sri Bintang Pamungkas, *Dibalik Jeruji Besi : Mengugat Dakwaan Subversif*, Hal. 12-18.

³³ Amnesty International, *Indonesia: Human Rights Violations Under the New Order Regime* (New York: Amnesty International, 1994), Hal. 23-41.

³⁴ Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Melalui Reformasi*. Hal. 5-112

5. Pentingnya Oposisi Politik

Dari karyanya ini, bukan hanya sekedar karya politik namun juga manifestasi intelektual dan ideologis dari gerakan pembaharuan nasional. Sri Bintang dengan tegas menawarkan alternatif arah pembaharuan politik Indonesia yang lebih partisipatif, egaliter, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, ide yang dituangkan dalam karyanya. “Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh kekuasaan Soeharto selama lebih 30 tahun bukanlah alang-kepalang, baik sosial, politik, ekonomi dan budaya. Ditambah dengan pertumpahan darah rakyat sipil Indonesia oleh pelor-pelor anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), oleh karena itu sistem Orde Baru harus di perbaiki, harus di ubah.”

Sri Bintang juga menyinggung mengenai lemahnya UUD 1945 dan sistem pemilihan presiden yang diterapkan oleh Soeharto juga Soekarno “tentang Soekarno dan Soeharto itu sama saja, mereka sebetulnya menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945, ya seperti itu jadinya, dia akan jatuh atau dijatuhkn. Dan saya melihat, bahwa keadaan ini tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar kita yang mempunyai kelemahan, mereka berdua sama-sama diktator.”³⁵

Peran dari Sri Bintang Pamungkas sangatlah penting untuk di perhatikan dalam membangun kesadaran politik pada masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks upaya untuk melawan sistem otoriter dalam pemerintahan. Melalui kritiknya terhadap Soeharto dan kebijakan yang dikeluarkannya pada Orde Baru terus-menerus dilakukan olehnya. Sri Bintang memiliki peran pengaruh yang sangat besar, bahkan menginspirasi gerakan perlawanan yang lebih luas di kalangan masyarakat hingga mahasiswa. Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi **“KRITIK INTELEKTUAL SRI BINTANG PAMUNGKAS TERHADAP KEBIJAKAN ORDE BARU TAHUN 1970-1998”**. Serta bagaimana keberaniannya menginspirasi reformasi dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pemahaman yang baik dan lebih mendalam mengenai dinamika perlawan rakyat, mahasiswa, para aktivis

³⁵ Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Melalui Reformasi*. Hal. 6-7.

terhadap pemerintahan yang otoritarian serta membuka pemahaman bagaimana pentingnya tokoh oposisi dalam mendorong perubahan politik yang berarti. Kajian mengenai respon Sri Bintang Pamungkas terhadap kebijakan Orde Baru memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika perlawanan terhadap otoritarianisme di Indonesia, serta peran individu dalam memperjuangkan reformasi dan demokratisasi.³⁶ Selain daripada itu menjadi khazanah keilmuan dan motivasi semangat kaum muda dalam mengembangkan kreatifitas keilmuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Riwayat Hidup Sri Bintang Pamungkas dan Kebijakan Masa Orde Baru Pada Tahun 1970-1998?
2. Bagaimana bentuk Kritik Intelektual Sri Bintang Pamungkas terhadap Kebijakan Orde Baru Pada Tahun 1970-1998?

C. Tujuan Penelitian

Dari point-point masalah di atas dapat di ambil dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Riwayat Hidup Sri Bintang Pamungkas dan Kebijakan Pada Masa Orde Baru Tahun 1970-1998.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Kritik Intelektual Sri Bintang Pamungkas terhadap Kebijakan Orde Baru Tahun 1970-1998.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah ringkasan tertulis mengenai artikel, jurnal, buku, skripsi, dan domen yang mendeskripsikan tentang teori informasi, dalam sebuah penelitian, kajian pustaka ini penting untuk meninformasikan kepada para pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan dengan penelitian yang dilakukan, menghubungkan literatur-literatur yang ada.³⁷ Tujuannya untuk menemukan atau mencari hasil karya penelitian yang ada

³⁶ Edward Aspinall, *Opposition and Democracy in Indonesia* (London : Routledge, 2005), Hal. 45-50.

³⁷ Widiarsa, "Kajian pustaka sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka" *Media Informasi* :vol.28. no 1 : Juni 2019, Hal.112-113.

sebelumnya sebagai upaya untuk menghindari dari sebuah plagiasi, mengetahui manfaat dari penelitian yang sebelumnya dan menjadi pembanding atau pembeda dari penelitian yang sudah ada dengan yang sekarang penulis teliti.

Dalam rangka penelitian ini penulis melakukan beberapa penelusuran sumber yang berkaitan dengan topik yang diteliti, untuk dijadikan pembeda dan pembanding diantaranya :

1. Buku yang ditulis oleh Imran Hasibun dengan judul Biografi Sri Bintang Pamungkas yang diterbitkan di Jakarta, penerbit Pijar Indonesia pada tahun 1997. Dalam buku ini hanya berfokus pada pemaparan biografi Sri Bintang Pamungkas.
2. Skripsi yang ditulis oleh Rianthy Kusumah, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2023, dengan judul “Aktivitas Politik Arief Budiman (Soe Hok Djinn) pada Masa Orde Baru (1966-1997)”. Penelitiannya lebih fokus kepada analisis mengenai aktivitas Arief Budiman pada masa Orde Baru, dan juga membahas biografi, karya, corak pemikiran, gerakan aktivis, hingga pengaruhnya mengenai perlawanan terhadap perpolitikan Indonesia Arief Budiman pada masa Orde Baru.
3. Jurnal, yang ditulis oleh Layla Septy Puspita, mahasiswa Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, dengan judul “Gerakan Protes Mahasiswa Surabaya Terhadap Kekuasaan Orde Baru Mei Tahun 1998 di Surabaya”. Penelitiannya lebih fokus kepada bagaimana proses gerakan protes, peran, dan dampak yang terjadi setelah gerakan mahasiswa Surabaya pada Mei 1998 terhadap kekuasaan Orde Baru.
4. Skripsi, yang ditulis oleh Niko Prayoga, Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Kritik Seno Gumira Ajidarma Terhadap Pemerintah Orde Baru Tahun 1984-1997”. Tulisan ini berfokus pada bagaimana kritik-kritik yang dilayangkan oleh Seno Gumira Ajidarma terhadap pemerintah dan kekuasaan Orde Baru.

Perbedaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah dari fokus objek atau tokoh yang dituliskan, penelitian ini lebih fokus bagaimana

bentuk Kritik Intelektual Sri Bintang Pamungkas dalam gerakan anti orde baru pada tahun 1970-1998. Meskipun dalam ruang yang sama membahas pada masa orde baru, namun pembedanya pada tokoh yang di sajikan, metode yang digunakan juga menggunakan pendekatan metodologi sejarah untuk merekonstruksi peran Sri Bintang Pamungkas dalam gerakan anti orde baru.

“Kritik Intelektual Sri Bintang Pamungkas Terhadap Kebijakan Orde Baru Tahun 1970-1998” ini belum ada penulisan yang dilakukan, atas dasar ini penulis ingin mengembangkan dalam penulisan ini. Maka dipastikan juga tidak adanya plagiasi dalam penulisan ini.

E. Metode Penelitian

Dalam setiap ilmu pengetahuan memiliki aturan dan petunjuk dan seperangkat aturan yang biasa disebut metode, artinya sebuah prosedur yang sistematis. Penelitian yang dilakukan adalah tulisan mengenai sejarah suatu peran dan peristiwa. Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Penelitian ini juga menggunakan perspektif sejarah sebagai sebuah pendekatan. Diperlukan pen-strukturan dalam pandangan sejarah sehingga terjadi sebuah proses melihat masa sekarang ini yang tidak bisa lepas dari masa lalunya serta tidak lepas dari periodisasi sebagai pembabaknya.³⁸

Objek penelitian ini ialah **“KRITIK INTELEKTUAL SRI BINTANG PAMUNGKAS TERHADAP KEBIJAKAN ORDE BARU TAHUN 1970-1998”**, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Historis. Langkah-langkah dalam metode Historis menurut Sulasman dalam bukunya Metodologi Penelitian Sejarah ada empat tahapan diantaranya Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah. Menurut Sulasman di bukunya Metodologi Penelitian Sejarah mengutip dari Notosusant

³⁸ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), Hal. 74

heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* artinya *to find* yang berarti tidak hanya menemukan tetapi mencari dahulu.³⁹

Dalam proses Heuristik ini penulis mulai dengan penelusuran sumber-sumber dan klasifikasi sumber-sumber yang digunakan dalam proses penelitian menurut M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi dalam bukunya *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* klasifikasi sumber dilakukan untuk menentukan hubungan antara sumber dan peristiwa, juga sebagai peringkat dalam menentukan kesahihan sumber terkait sumber primer dan sekunder.⁴⁰ Pencarian sumber tersebut dilakukan dengan Studi Literatur dari karya yang dibuat oleh tokoh yang diteliti dan karya yang berkaitan. Pengklasifikasian tersebut dapat diuraikan berdasarkan kekuatan dan kualitas sumber dengan data sebagai berikut:



1) Sumber Primer yang diperoleh :

1. Sumber Tertulis :

a) Buku :

1. Buku Sri Bintang Pamungkas “Ganti Rezim Ganti Sistem : Pergulatan Menguasai Nusantara” diterbitkan pada tahun 2014, penerbit El Bisma, Jakarta.
2. Buku Sri Bintang Pamungkas “Melawan Kediktatoran : Pergulatan Tak Kunjung usai” diterbitkan pada tahun 2013, penerbit Galang Press, Yogyakarta.
3. Buku Sri Bintang Pamungkas “Menantang Seorang Diktator : Perjalanan di Jerman” diterbitkan pada tahun 2008, penerbit RM Books, Jakarta.

³⁹ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hal. 93

⁴⁰ Johan Wahyudhi M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah : Sebuah Pengantar* (Depok: Prenamedia Group, 2014), Hal. 222

4. Buku Sri Bintang Pamungkas “Dari Orde Baru ke Indonesia Baru : Lewat Reformasi Total” diterbitkan pada tahun 2001, penerbit Erlangga, Jakarta.
5. Buku Sri Bintang Pamungkas “Dibalik Jeruji Besi : Menggugat Dakwaan Subversif” diterbitkan pada tahun 2000, penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
6. Buku Sri Bintang Pamungkas “Sri Bintang Pamungkas dan Daulat Rakyat” diterbitkan pada tahun 1997.
7. Buku Sri Bintang Pamungkas “Perintis Oposisi dan Reformasi” diterbitkan pada tahun 1998, penerbit Grasindo, Jakarta.
8. Buku Sri Bintang Pamungkas “Saya Musuh Politik Soeharto” diterbitkan pada tahun 1996, penerbit Pijar Indonesia, Jakarta Selatan.
9. Buku “Soeharto : Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya,” diterbitkan pada tahun 1989, penerbit Citra Lamtoro Gung Persada, di Jakarta.
10. Buku Tjahyadi Nugroho “Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia,” diterbitkan pada tahun 1985, penerbit Yayasan Telapak, di Semarang.

b) Jurnal :

1. Sri Bintang Pamungkas, “*Kriminalisasi Kritik dan Bahaya Negara Otoriter Baru,*” dalam *Jurnal Politik Rakyat*, Vol. 3 No. 2 (2018).
2. Sri Bintang Pamungkas, “Liberalisasi dan Ketimpangan Struktural,” dalam *Jurnal Politik Rakyat*, Vol. 2 No. 1 (2004).
3. Sri Bintang Pamungkas, “Pembangunan Palsu dalam Bayang-bayang Asing,” dalam *Jurnal Politik Rakyat*, Vol. 2 No. 2 (2003): hlm. 18.
4. Sri Bintang Pamungkas, “*Utang Luar Negeri dan Penjajahan Baru,*” *Jurnal Politik Rakyat*, Vol. 1 No. 2 (2003).
5. Sri Bintang Pamungkas, *Catatan Demokrasi: Dari Parlemen ke Penjara*, (Jakarta: Syarikat Indonesia, 1999).

c) Koran :

1. Koran pemberitaan Sri Bintang Pamungkas dalam keterlibatan di Partai Persatuan Pembangunan, penerbit Forum Keadilan : Nomor 25, Tahun 1995.
2. Koran pemberitaan wawancara dengan Sri Bintang Pamungkas mengenai pembahasan “Mereka Telah Mengkhianati Partai” dalam keterlibatan di Partai Persatuan Pembangunan, diterbitkan oleh Sinar, 5 September 1994.
3. Koran pemberitaan wawancara “Sri Bintang Pamungkas : Saya Kecewa Terhadap Partai, Bahkan Merasa Tertipu” diterbitkan oleh Forum Keadilan : Nomor 25, Tahun III, 30 Maret 1995.
4. Koran Pemberitaan Demonstrasi yang terjadi di Jerman terhadap Soeharto ketika melaksanakan kunjungan ke Jerman dengan judul “Menengok Kembali Peristiwa Dresden : Catatan Seorang Saksi Mata” Halaman 26, tahun 1995.
6. Koran Berita Yudha, POLITIKA Suplemen Politik Setiap Hari : “Menolak Pemilu, Mimpi Siang Bolong Bintang” 1997
7. Koran Berita Yudha, Harian Umum : Selebaran Gelap Boikot Pemilu Melanda Bogor. 1997.
8. Koran Berita Yudha : Polri Masih Meneliti Isi Ceramah Sri Bintang di Jerman 1995
9. Koran Analisa : DPP PPP Me-recall Sri Bintang Pamungkas. 1995
10. Koran Harian Analisa : Penahanan Atas Demonstrasi di Jerman 1995
11. Koran Harian Analisa : Penahanan Atas Demonstrasi di Jerman 1995
12. Koran Analisa : Perkara Sri Bintang dalam Proses Pemberkasan 1995.
13. Koran Analisa : Tim Pembela Sri Bintang Minta Sidang Pidana Dihentikan 1995
14. Koran Berita Forum : wawancara “Sri Bintang Pamungkas : Saya Kecewa Terhadap Partai, Bahkan Merasa Tertipu.” 1995
15. Koran Forum Keadilan, Sri Bintang Pamungkas : "Status Quo Ada Batasnya. 1993.
16. Koran Bali Post : Berita Pendirian PUDI 1996.

17. Koran Bali Post, Harian Untuk Umum : Bintang Pamungkas Akhirnya Di-“recall” 1995.
18. Kompas, “Sri Bintang : Antara Akademisi dan Aktivis,” Kompas, 12 Desember 1996.
19. Koran Analisa : Tim Pembela Sri Bintang Minta Sidang Pidana Dihentikan. 23 November 1995. Hal. 11.
20. Koran Berita Yudha (1997), “POLITIKA : Suplemen Politik Pertama Setiap Hari.” 10 Maret 1997.
21. Koran Harian Analisa (1995) : DPP PPP Akhirnya Me-Recall Sri Bintang Pamungkas. Selasa, 28 Pebruari 1995.

2) Sumber Sekunder yang diperoleh :

a) Sumber Tulisan :

1. Amnesty International, *Indonesia: Human Rights Violations Under the New Order Regime* (New York: Amnesty International, 1994).
2. Damien Kingsbury “Power Politics and the Indonesian Military” (New York: Routledge, 2003)
3. Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds.), *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch* (Canberra: ANU Press, 2010)
4. Max Lane, *Unfinished Nation: Indonesia before and after Suharto* (London: Verso, 2008)
5. Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1988).
6. Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (Sydney: Allen & Unwin, 1986).
7. Edward Aspinall, *Opposition and Democracy in Indonesia* (London: Routledge, 2005).
8. Buku Peter Kasenda “Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?.”
9. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sri_Bintang_Pamungkas

2. Kritik

Tahapan kedua dalam metode penelitian sejarah adalah kritik, tujuannya ialah pengujian terhadap sumber-sumber yang akan dijadikan sumber penulisan sejarah. Semua sumber di verifikasi, di golongankan menjadi dua kritikan yang bersifat ekstern dan intern.

1) Kritik Ekstern

Kritik Ekstern dilakukan untuk mengetahui autensitas atau keaslian sumber. Kritik ekstern adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah.⁴¹ Dalam hal ini untuk mengetahui keaslian sumber, penulis melakukan beberapa cara diantaranya menyelidiki bentuk sumber, subnasi atau usia sumber, waktu dan tempat pembuatannya diantara sumber-sumbernya.

a. Sumber tertulis :

a) Buku :

1. Buku Sri Bintang Pamungkas “Saya Musuh Politik Soeharto” diterbitkan pada tahun 1996, penerbit Pijar Indonesia, Jakarta Selatan. Bentuk buku masih bagus, terbaca dengan baik, menggunakan kertas kuning, isi buku ini menggunakan bahasa Indonesia dengan diksi khas Sri Bintang Pamungkas yaitu khasnya seorang aktivis. Buku ini saya dapatkan dan temukan di Perpustakaan Batu Api, Jatinangor.
2. Buku Laporan Kasus Bintang : Suatu Catatan Kronologi, Seri 1, diterbitkan pada tahun 1995, penerbit Direktorat Operasional : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Buku ini didapatkan dengan keadaan baik, kertas putih, tulisan masih terbaca jelas, buku ini saya dapatkan di Perpustakaan Batu Api, Jatinangor.
3. Buku Sri Bintang Pamungkas “Ganti Rezim Ganti Sistem : Pergulatan Menguasai Nusantara” yang diterbitkan pada tahun 2014, penerbitnya adalah El Bisma, Jakarta. Bentuk buku masih bagus, terbaca dengan baik, isi buku ini menggunakan bahasa Indonesia dengan diksi khas Sri

⁴¹ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*, Hal. 102

Bintang Pamungkas yaitu khasnya seorang aktivis. Buku ini saya dapatkan dan temukan dalam bentuk softfile PDF nya dari perpustakaan online.

4. Buku Sri Bintang Pamungkas “Melawan Kediktatoran : Pergulatan Tak Kunjung usai” diterbitkan pada tahun 2013, penerbit Galang Press, Yogyakarta. Bentuk buku masih bagus, terbaca dengan baik, isi buku ini menggunakan bahasa Indonesia dengan diksi khas Sri Bintang Pamungkas yaitu khasnya seorang aktivis. Buku ini saya dapatkan dan temukan dalam bentuk softfile PDF nya dari perpustakaan online.
5. Buku Sri Bintang Pamungkas “Menantang Seorang Diktator :Perjalanan di Jerman” diterbitkan pada tahun 2008, penerbit RM Books, Jakarta. Bentuk buku masih bagus, terbaca dengan baik, isi buku ini menggunakan bahasa Indonesia dengan diksi khas Sri Bintang Pamungkas yaitu khasnya seorang aktivis. Buku ini saya dapatkan dan temukan dalam bentuk softfile PDF nya dari perpustakaan online.
6. Buku Sri Bintang Pamungkas “Dari Orde Baru ke Indonesia Baru : Lewat Reformasi Total” diterbitkan pada tahun 2001, penerbit Erlangga, Jakarta. Bentuk buku masih bagus, terbaca dengan baik, isi buku ini menggunakan bahasa Indonesia dengan diksi khas Sri Bintang Pamungkas yaitu khasnya seorang aktivis. Buku ini saya dapatkan dan temukan dalam bentuk softfile PDF nya dari perpustakaan online.
7. Buku Sri Bintang Pamungkas “Dibalik Jeruji Besi : Menggugat Dakwaan Subversif” diterbitkan pada tahun 2000, penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Bentuk buku masih bagus, terbaca dengan baik, isi buku ini menggunakan bahasa Indonesia dengan diksi khas Sri Bintang Pamungkas yaitu khasnya seorang aktivis. Buku ini saya dapatkan file PDF nya dari perpustakaan online.
8. Buku Sri Bintang Pamungkas “Sri Bintang Pamungkas dan Daulat Rakyat” diterbitkan pada tahun 1997. Bentuk buku masih bagus, terbaca dengan baik, isi buku ini menggunakan bahasa Indonesia dengan diksi khas Sri Bintang Pamungkas yaitu khasnya seorang aktivis. Buku ini

saya dapatkan dan temukan dalam bentuk softfile PDF-nya dari perpustakaan online.

9. Buku Sri Bintang Pamungkas “Perintis Oposisi dan Reformasi” diterbitkan pada tahun 1998, penerbit Grasindo, Jakarta. Bentuk buku masih bagus, terbaca dengan baik, isi buku ini menggunakan bahasa Indonesia dengan diksi khas Sri Bintang Pamungkas yaitu khasnya seorang aktivis. Buku ini saya dapatkan dan temukan dalam bentuk softfile PDF-nya dari perpustakaan online.
10. Buku “Soeharto : Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya,” diterbitkan pada tahun 1989, penerbit Citra Lamtoro Gung Persada, di Jakarta. Keadaan dari buku ini masih sangat baik, terbaca dengan jelas. Buku ini saya dapatkan di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
11. Buku Tjahyadi Nugroho “Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia,” diterbitkan pada tahun 1985, penerbit Yayasan Telapak, di Semarang. Keadaan dari buku ini masih sangat baik, terbaca dengan jelas. Buku ini saya dapatkan di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b) Jurnal :

1. Sri Bintang Pamungkas, “*Kriminalisasi Kritik dan Bahaya Negara Otoriter Baru,*” dalam *Jurnal Politik Rakyat*, Vol. 3 No. 2 (2018). Jurnal ini merupakan tulisan langsung oleh Sri Bintang Pamungkas mengenai pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru.
2. Sri Bintang Pamungkas, “*Liberalisasi dan Ketimpangan Struktural,*” dalam *Jurnal Politik Rakyat*, Vol. 2 No. 1 (2004). Jurnal ini merupakan tulisan langsung oleh Sri Bintang Pamungkas mengenai pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru.
3. Sri Bintang Pamungkas, “*Pembangunan Palsu dalam Bayang-bayang Asing,*” dalam *Jurnal Politik Rakyat*, Vol. 2 No. 2 (2003). Jurnal ini merupakan tulisan langsung oleh Sri Bintang Pamungkas mengenai pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru.
4. Sri Bintang Pamungkas, “*Utang Luar Negeri dan Penjajahan Baru,*” *Jurnal Politik Rakyat*, Vol. 1 No. 2 (2003). Jurnal ini merupakan tulisan

langsung oleh Sri Bintang Pamungkas mengenai pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru.

5. Sri Bintang Pamungkas, *Catatan Demokrasi: Dari Parlemen ke Penjara*, (Jakarta: Syarikat Indonesia, 1999). Jurnal ini merupakan tulisan langsung oleh Sri Bintang Pamungkas mengenai pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru.

a. Koran :

1. Koran pemberitaan Sri Bintang Pamungkas dalam keterlibatan di Partai Persatuan Pembangunan, penerbit Forum Keadilan : Nomor 25, Tahun 1995. Koran ini di dapatkan dalam bentuk softfile gambar dari Warungarsip.co, tulisan dalam koran ini masih jelas terbaca, kertas pada gambar berwarna kuning.
2. Koran pemberitaan wawancara dengan Sri Bintang Pamungkas mengenai pemabahasan “Mereka Telah Mengkhianati Partai” dalam keterlibatan di Partai Persatuan Pembangunan, di dalam koran ini Sri Bintang memberikan kritiknya tentang pemegang PPP yang tidak mengerti terhadap fungsi hadirnya partai, yang seharusnya membela rakyat namun malah tunduk kepada kekuasaan pemerintah, diterbitkan oleh Sinar, 5 September 1994. Koran ini di dapatkan dalam bentuk softfile gambar dari Warungarsip.co, tulisan dalam koran ini masih jelas terbaca, kertas pada gambar berwarna kuning.
3. Koran pemberitaan wawancara “Sri Bintang Pamungkas : Saya Kecewa Terhadap Partai, Bahkan Merasa Tertipu” diterbitkan oleh Forum Keadilan : Nomor 25, Tahun III, 30 Maret 1995. Dalam koran ini membahas mengenai keputusan oleh pimpinan PPP untuk “merecall” Sri Bintang dari DPR, namun belum adanya kejelasan kesalahan yang dilakukan Sri Bintang yang menjadi alasanya di “Recall”. Menurut laporan Menko Polkam adalah karena Sri Bintang sering mempersoalkan Pancasila, dinyatakan anti pancasila, melanggar rambu-rambu partai, dianggap melecehkan Gubernur Bank Indonesia,, dan dianggap anti-dwifungsi ABRI. Koran ini di dapatkan dalam bentuk softfile gambar

dari Warungarsip.co, tulisan dalam koran ini masih jelas terbaca, kertas pada gambar berwarna kuning.

4. Koran Pemberitaan Demonstrasi yang terjadi di Jerman terhadap Soeharto ketika melaksanakan kunjungan ke Jerman dengan judul “Menengok Kembali Peristiwa Dresden : Catatan Seorang Saksi Mata” Halaman 26, tahun 1995. Koran ini di dapatkan dalam bentuk softfile gambar dari Warungarsip.co, tulisan dalam koran ini kurang jelas terbaca, kertas pada gambar berwarna kuning.
5. Koran Berita Yudha, POLITIKA Suplemen Politik Setiap Hari : “Menolak Pemilu, Mimpi Siang Bolong Bintang” 1997. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
6. Koran Berita Yudha, Harian Umum : Selebaran Gelap Boikot Pemilu Melanda Bogor. 1997. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
7. Koran Berita Yudha : Polri Masih Meneliti Isi Ceramah Sri Bintang di Jerman 1995. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
8. Koran Analisa : DPP PPP Me-recall Sri Bintang Pamungkas. 1995. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
9. Koran Harian Analisa : Penahanan Atas Demonstrasi di Jerman 1995. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki

nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.

10. Koran Harian Analisa : Penahanan Atas Demonstrasi di Jerman 1995. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
11. Koran Analisa : Perkara Sri Bintang dalam Proses Pemberkasan 1995. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
12. Koran Analisa : Tim Pembela Sri Bintang Minta Sidang Pidana Dihentikan 1995. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
13. Koran Berita Forum : wawancara “Sri Bintang Pamungkas : Saya Kecewa Terhadap Partai, Bahkan Merasa Tertipu.” 1995. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
14. Koran Forum Keadilan, Sri Bintang Pamungkas : "Status Quo Ada Batasnya. 1993. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.

15. Koran Bali Post : Berita Pendirian PUDI 1996. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
16. Koran Bali Post, Harian Untuk Umum : Bintang Pamungkas Akhirnya Di-“recall” 1995. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
17. Kompas, “Sri Bintang : Antara Akademisi dan Aktivis,” Kompas, 12 Desember 1996. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
18. Koran Analisa : Tim Pembela Sri Bintang Minta Sidang Pidana Dihentikan. 23 November 1995. Hal. 11. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
19. Koran Berita Yudha (1997), “POLITIKA : Suplemen Politik Pertama Setiap Hari.” 10 Maret 1997. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.
20. Koran Harian Analisa (1995) : DPP PPP Akhirnya Me-Recall Sri Bintang Pamungkas. Selasa, 28 Februari 1995. Koran ini didapatkan dari website *Komdigi.go.id/*. koran ini memiliki nilai historis penting karena

mencatat dan menginformasikan mengenai Kritik Sri Bintang Pamungkas. Keadaan dari koran ini masih tersedia dengan baik dan terbaca seluruh informasinya dengan jelas.

2) Kritik Intern

Kritik intern merupakan lanjutan dari kritik ekstern, pada tahap ini bertujuan untuk meneliti kebenaran sumber. Setelah menemukan kebenarannya asli, kredibel, dan relevan, sumber tersebut maka dilanjutkan dengan mengkritisi mengenai isi, apakah dapat dipercaya kebenarannya.

Beberapa sumber-sumber primer yang menjadi rekapan dalam melakukan kritik Intern ini sebagai sumber primer penelitian ini :

1. Sumber Tulisan :

a) Buku

6. Buku Sri Bintang Pamungkas “Saya Musuh Politik Soeharto” diterbitkan pada tahun 1996, penerbit Pijar Indonesia, Jakarta Selatan. Merupakan karya tulis langsung oleh Sri Bintang Pamungkas, dalam buku ini berisi mengenai biografi perjuangan Sri Bintang Pamungkas saat masa pemerintahan Soeharto, kronologi kasus undangan ke Jerman.
7. Buku Sri Bintang Pamungkas “Ganti Rezim Ganti Sistim : Pergulatan Menguasai Nusantara” diterbitkan pada tahun 2014, penerbit El Bisma, Jakarta. Pamungkas, Sri Bintang. Ganti rezim, ganti sistim: pergulatan menguasai Nusantara. Indonesia : El Bisma, 2014. Merupakan karya tulis langsung oleh Sri Bintang Pamungkas, dalam buku ini berisi mengenai latar belakang sejarah perpolitikan di Indonesia sejak Soekarno samapai sekarang, dengan penekanan di awal rezim kekuasaan partai oleh Soeharto.
8. Buku Laporan Kasus Bintang : Suatu Catatan Kronologi, Seri 1, diterbitkan pada tahun 1995, penerbit Direktorat Operasional : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Buku ini merupakan tulisan asli oleh Sri Bintang mengenai Laporan Kasus, Suatu catatan kronologi adanya tuduhan penghinaan terhadap Presiden ketika ceramah di Jerman.

9. Buku Sri Bintang Pamungkas “Melawan Kediktatoran : Pergulatan Tak Kunjung usai” diterbitkan pada tahun 2013, penerbit Galang Press, Yogyakarta. Merupakan karya tulis langsung oleh Sri Bintang Pamungkas, dalam buku ini berisi mengenai perjuangan Sri Bintang melawan kekuasaan otoriter, upaya untuk menyuarakan keadilan dan demokrasi, serta kritik terhadap pemerintahan yang dianggap merugikan masyarakat luas.
10. Buku Sri Bintang Pamungkas “Menantang Seorang Diktator : Perjalanan di Jerman” diterbitkan pada tahun 2008, penerbit RM Books, Jakarta. Merupakan karya tulis langsung oleh Sri Bintang Pamungkas, dalam buku ini berisi mengenai konsistensinya dalam perlawanan yang dilanjutkan dari luar negeri dan berusaha menarik dukungan global untuk mendukung gerakan reformasi di Indonesia.
11. Buku Sri Bintang Pamungkas “Dari Orde Baru ke Indonesia Baru : Lewat Reformasi Total” diterbitkan pada tahun 2001, penerbit Erlangga, Jakarta. Merupakan karya tulis langsung oleh Sri Bintang Pamungkas, dalam buku ini berisi memuat mengenai gagasan, pikiran, dan saran mengenai aspek-aspek legal dari penyelenggaraan Republik yang kokoh, segar, dan sehat. Gagasan dan pemikirannya ini layak bagi semua reformis untuk dipelajari dan dikaji.
12. Buku Sri Bintang Pamungkas “Dibalik Jeruji Besi : Menggugat Dakwaan Subversif” diterbitkan pada tahun 2000, penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Merupakan karya tulis langsung oleh Sri Bintang Pamungkas, dalam buku ini berisi mengenai penggambaran penalaman Sri Bintang dalam menghadapi dakwaan subversif, kritik tajam terhadap represi politik dan penggunaan hukum sebagai alat kontrol di bawah Orde Baru untuk membungkam perbedaan pendapat.
13. Buku Sri Bintang Pamungkas “Sri Bintang Pamungkas dan Daulat Rakyat” diterbitkan pada tahun 1997. Merupakan karya tulis langsung oleh Sri Bintang Pamungkas, dalam buku ini berisi mengenai Pandangan, perjuangan, dan pemikiran Sri Bintang Pamungkas tentang demokrasi serta kedaulatan rakyat di Indonesia menjadi inti pembahasan buku ini. Buku tersebut menyoroti visi dan misi Sri Bintang dalam upayanya membangun

Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan berdaulat, dengan menekankan peran rakyat sebagai pusat kekuasaan negara.

14. Buku Sri Bintang Pamungkas “Perintis Oposisi dan Reformasi” diterbitkan pada tahun 1998, penerbit Grasindo, Jakarta. Merupakan karya tulis langsung oleh Sri Bintang Pamungkas, dalam buku ini berisi mengenai Buku ini mengupas perjuangan Sri Bintang Pamungkas sebagai pelopor gerakan oposisi di Indonesia dan kontribusinya dalam mendorong gerakan reformasi yang menentang kekuasaan Orde Baru. Buku ini menggali peran Sri Bintang sebagai sosok yang berani menentang rezim otoriter, sekaligus memberikan wawasan mengenai perjalanan panjang menuju reformasi di Indonesia.
15. Buku “Soeharto : Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya,” diterbitkan pada tahun 1989, penerbit Citra Lamtoro Gung Persada, di Jakarta. Buku ini membahas prespektif langsung dari Soeharto tentang berbagai peristiwa dan kebijakan yang terjadi pada masa pemerintahannya.
16. Buku Tjahyadi Nugroho “Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia,” diterbitkan pada tahun 1985, penerbit Yayasan Telapak, di Semarang. Isi dalam buku ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto.

b) Jurnal :

1. Sri Bintang Pamungkas, “*Kriminalisasi Kritik dan Bahaya Negara Otoriter Baru,*” dalam *Jurnal Politik Rakyat*, Vol. 3 No. 2 (2018). Jurnal ini merupakan tulisan langsung oleh Sri Bintang Pamungkas mengenai pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru.
2. Sri Bintang Pamungkas, “*Liberalisasi dan Ketimpangan Struktural,*” dalam *Jurnal Politik Rakyat*, Vol. 2 No. 1 (2004). Jurnal ini merupakan tulisan langsung oleh Sri Bintang Pamungkas mengenai pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru.
3. Sri Bintang Pamungkas, “*Pembangunan Palsu dalam Bayang-bayang Asing,*” dalam *Jurnal Politik Rakyat*, Vol. 2 No. 2 (2003). Jurnal ini merupakan tulisan langsung oleh Sri Bintang Pamungkas mengenai pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru.

4. Sri Bintang Pamungkas, *“Utang Luar Negeri dan Penjajahan Baru,”* Jurnal Politik Rakyat, Vol. 1 No. 2 (2003). Jurnal ini merupakan tulisan langsung oleh Sri Bintang Pamungkas mengenai pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru.
5. Sri Bintang Pamungkas, *Catatan Demokrasi: Dari Parlemen ke Penjara,* (Jakarta: Syarikat Indonesia, 1999). Jurnal ini merupakan tulisan langsung oleh Sri Bintang Pamungkas mengenai pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru.

c) Koran :

1. Koran pemberitaan Sri Bintang Pamungkas dalam keterlibatan di Partai Persatuan Pembangunan, penerbit Forum Keadilan : Nomor 25, Tahun 1995. Koran ini di dapatkan dalam bentuk softfile gambar dari Warungarsip.co.
2. Koran pemberitaan wawancara dengan Sri Bintang Pamungkas mengenai pemabahasan “Mereka Telah Mengkhianati Partai” dalam keterlibatan di Partai Persatuan Pembangunan, di dalam koran ini Sri Bintang memberikan kritiknya tentang pemegang PPP yang tidak mengerti terhadap fungsi hadirnya partai, yang seharusnya membela rakyat namun malah tunduk kepada kekuasaan pemerintah, “Sri Bintang Pamungkas : Di Luar Mukhtamar PPP” diterbitkan oleh Sinar, 5 September 1994. Koran ini di dapatkan dalam bentuk softfile gambar dari Warungarsip.co.
3. Koran pemberitaan wawancara “Sri Bintang Pamungkas : Saya Kecewa Terhadap Partai, Bahkan Merasa Tertipu” diterbitkan oleh Forum Keadilan : Nomor 25, Tahun III, 30 Maret 1995. Dalam koran ini membahas mengenai keputusan oleh pimpinan PPP untuk “merecall” Sri Bintang dari DPR, namun belum adanya kejelasan kesalahan yang dilakukan Sri Bintang yang menjadi alasanya di “Recall”. Menurut laporan Menko Polkam adalah karena Sri Bintang sering mempersoalkan Pancasila, dinyatakan anti pancasila, melanggar rambu-rambu partai, dianggap melecehkan Gubernur Bank Indonesia,, dan dianggap anti-

dwifungsi ABRI. Koran ini di dapatkan dalam bentuk softfile gamabar dari Warungarsip.co.

4. Koran Pemberitaan “Sri Bintang Pamungkas, Soeharto, dan Peristiwa Dresden di Jerman : Catatan Seorang Saksi Mata” Demontrasi yang terjadi di Jerman terhadap Soeharto ketika melaksanakan kunjungan ke Jerman dengan judul “Menengok Kembali Peristiwa Dresden : Catatan Seorang Saksi Mata” Halaman 26, Suara INDEPENDEN, No. 01, 1 Juni, tahun 1995. Koran ini di dapatkan dalam bentuk softfile gamabar dari Warungarsip.co.
5. Koran Berita Yudha, POLITIKA Suplemen Politik Setiap Hari : “Menolak Pemilu, Mimpi Siang Bolong Bintang” 1997. Koran ini memberitakan tentang kritiknya dan penolakanya terhadap sistem pemilu masa Orde Baru.
6. Koran Berita Yudha, Harian Umum : Selebaran Gelap Boikot Pemilu Melanda Bogor. 1997. Dalam surat kabar ini dijelaskan bahwa adanya selebaran boikkot pemilu Orde Baru, menjadi salahsatu langkah dalam penolakan pemilu Orde Baru.
7. Koran Berita Yudha : Polri Masih Meneliti Isi Ceramah Sri Bintang di Jerman 1995. Dalam surat kabar ini dijelaskan mengenai penyelidikan polisi terhadap ceramah yang dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas.
8. Koran Analisa : DPP PPP Me-recall Sri Bintang Pamungkas. 1995. Dalam surat kabar ini dijelaskan mengenai pemanggilan atau pemberhentian Sri Bintang Pamungkas oleh DPP dari jabatannya sebagai perwakilan dari PPP di DPR.
9. Koran Harian Analisa : Penahanan Atas Demontrasi di Jerman 1995. Dalam surat kabar ini dijelaskan mengenai penahanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Sri Bintang Pamungkas atas tuduhan Subversif.
10. Koran Harian Analisa : Penahanan Atas Demontrasi di Jerman 1995. Dalam surat kabar ini dijelaskan mengenai penahanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para demonstiran yang melakukan demonstrasi terhadap Presiden Soeharto ketika melakukan kunjungan ke Jerman.

11. Koran Analisa : Perkara Sri Bintang dalam Proses Pemberkasan 1995. Dalam surat kabar ini dijelaskan mengenai penahanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Sri Bintang Pamungkas atas tuduhan tindakan Subversif oleh Sri Bintang Pamungkas.
12. Koran Analisa : Tim Pembela Sri Bintang Minta Sidang Pidana Dihentikan 1995. Dalam surat kabar ini dijelaskan mengenai team pembela Sri Bintang minta dihentikan atas penyelidikan dan penahanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Sri Bintang Pamungkas atas tuduhan tindakan Subversif oleh Sri Bintang Pamungkas.
13. Koran Bali Post : Berita Pendirian PUDI 1996. Dalam surat kabar ini dijelaskan mengenai tujuan dari pembentukan Parta Uni Demokrasi Indonesia yang menjadi salah satu bentuk kritik yang dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas.
14. Koran Bali Post, Harian Untuk Umum : Bintang Pamungkas Akhirnya Di-“recall” 1995. Dalam surat kabar ini dijelaskan mengenai pemanggilan atau pemberhentian Sri Bintang Pamungkas oleh DPP dari jabatannya sebagai perwakilan dari PPP di DPR.
15. Kompas, “Sri Bintang : Antara Akademisi dan Aktivis,” Kompas, 12 Desember 1996. Dalam surat kabar ini dijelaskan mengenai pemanggilan atau pemberhentian Sri Bintang Pamungkas oleh DPP dari jabatannya sebagai perwakilan dari PPP di DPR.

3. Interpretasi

Tahap ketiga adalah Interpretasi merupakan penafsiran sejarah. Fakta-fakta sejarah yang berhasil di dapatkan di susun dan kumpulkan menjadi cerita peristiwa sejarah. Interpretasi dapat dilakukan dengan dua cara ada Interpretasi Analisis yaitu dengan menguraikan fakta-fakta satu-persatu sehingga memperluas perspektif terhadap fakta tersebut, dari hasil itu ditarik kesimpulan. Yang kedua Interpretasi Sintesis yaitu mengumpulkan beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta tersebut.⁴² Di interpretasi ini penulis menggunakan tahapan

⁴² Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*., Hal. 226

interpretasi analisis menguraikan fakta-fakta satu persatu baik primer dan sekunder, lalu digabungkan dan dianalisis satu-persatu sehingga mendapatkan kesimpulan menjadi keseluruhan peristiwa atau kisah yang harmonis dan masuk akal.

Dalam meneliti **“Kritik Intelektual Sri Bintang Pamungkas Terhadap Kebijakan Orde Baru Tahun 1970-1998”**, untuk memperjelas terhadap analisis dalam penelitian ini maka digunakan Teori Kharismatik yang dikemukakan oleh Max Weber (1864-1920), Weber mendefinisikan teori ini sebagai otoritas yang bersumber dari kualitas luar biasa seseorang yang mampu mempengaruhi pengikut atau masyarakat.⁴³ Dalam konteks ini, kharisma Sri Bintang Pamungkas dapat di analisis sebagai salah satu faktor yang membuat kritik intelektualnya berpengaruh dalam perjuangan mengoreksi kebijakan Orde Baru dengan melalui tindakan kolektif yang terjadi sebagai respon terhadap kesempatan dan tantangan politik yang ada, seperti dalam perubahan pada kebijakan pemerintah atau kondisi sosial. Pada kondisi adanya ketidakpuasan sosial, tekanan ekonomi, dan ketegangan politik memberikan peluang untuk Sri Bintang Pamungkas sendiri dalam melakukan kritik terhadap Orde Baru. Selain daripada itu menekankan pada taktik dan mobilisasi masa sebagai elemen penting dalam gerakan sosial yang sangat relevan dikaitkan dengan pendirian Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) oleh Sri Bintang menuju pada perubahan yang lebih baik.⁴⁴

4. Historiografi

Tahapan terakhir dalam penggunaan metode sejarah adalah Historiografi, ialah proses penyusunan fakta sejarah dari berbagai sumber yang telah di seleksi dalam bentuk penulisan sejarah.⁴⁵ Dalam tahap ini mencakup cara penulisan, pemaparan atau laporan dari hasil penelitian sejarah yang telah di lakukan. Ditahap ini juga penulis dituntun untuk menuliskan sejarah dari hasil interpretasi menjadikan suatu tulisan dengan fakta dan logis dengan bahasa yang baik yang akhirnya menjadikan tulisan sejarah yang mendekati aslinya dan dapat di percaya.

⁴³ Max Weber, *Economy and Society : An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978), Hal. 241-246.

⁴⁴ Syawaludin Mohammad, *Sosiologi Perlawanan, Studi Perlawanan Repertoar Petani di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan*, (Yogyakarta, Deepublish, CV Budi Utama, 2017), Hal.36.

⁴⁵ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*, Hal. 147

sistematika penulisan kedepannya dengan Judul **“Kritik Intelektual Sri Bintang Pamungkas Terhadap Kebijakan Orde Baru Tahun 1970-1998”** ditulis menjadi beberapa bagian secara sistematis, sebagai berikut :

BAB I

Pada BAB ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Metode Penelitian Sejarah (Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Hostoriografi).

BAB II

Pada BAB ini akan diuraikan mengenai riwayat hidup Sri Bintang Pamungkas, bagaimana kebijakan-kebijakan yang hadir pada masa Orde Baru, dan dampak kebijakan Orde Baru.

BAB III

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai periodisasi dan bentuk kritik tajam Sri Bintang Pamungkas, Sikap Orde Baru terhadap Sri Bintang Pamungkas, Proses pengadilan dan penjara, perjalanan di penjara, para pembela dan juga penentang Sri Bintang Pamungkas, dan Sri Bintang Pamungkas dan reformasi.

BAB IV

Dalam BAB ini berisi mengenai kesimpulan dari peneliatian skripsi ini.